BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung. Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No.27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan POSTSPAARBANK, yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (*rush*). Namun demikian keadaan keuangan POSTSPAARBANK pulih kembali pada tahun 1941.

Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan POSTSPAARBANK dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan R.I. 17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada Bp. Darmosoetanto untuk memprakarsai pemgambilalihan TYOKIN KIYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah R.I. dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bp. Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I. menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumru panjang, karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949. Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949), nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementrian Perhubungan.

Banyak kejadian bernilai sejarah tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU Darurat No.9 th. 1950 tgl. 9 Februari 1950 yang mengubah nama "POSTSPAARBANK IN INDONESIA" berdasarkan staatsblat No. 295 th.1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementrian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK

TABUNGAN POS menurut Undang-undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 th. 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No.4 th. 1963 tgl. 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No.2 th. 1964 tgl. 25 Mei 1964.

Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan UU No.20 th. 1968 tgl. 19-12-1968 yang sebelumnya (sejak th.1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI Unt V, jika tugas utama saat pendirian POSTSPAARBANK (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976, karena itula tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN.

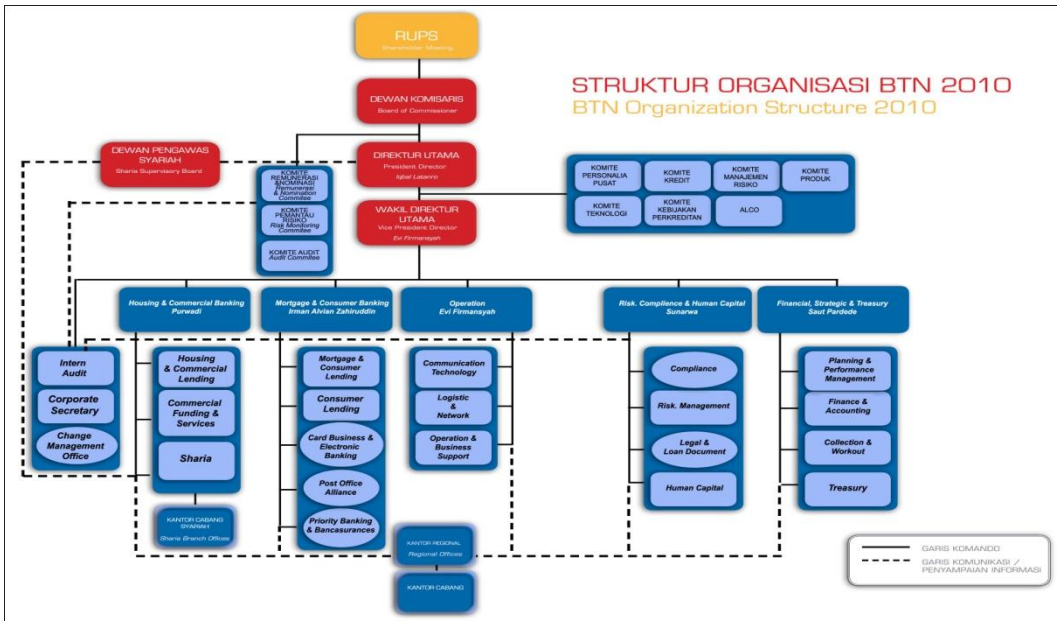
Bentuk Hukum BTN mengalami perubahan lagi pada th. 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 th. 1992 tgl.29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No.7 th. 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan call name BANK BTN. Berdasarkan kajian konsultan independent. Price Waterhouse Coopers. Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-554/M-

MBU/2002 tgl. 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Makin banyak kegiatan yang dilakukan, makin komplek pula hubungan-hubungan yang ada. Untuk itu perlulah dibuat suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan antara masing-masing kegiatan.

Untuk keterangan lebih jelas, maka struktur organisasi perusahaan dilihat pada gambar 4.1 berikut :



Sumber : PT. Bank Tabungan Negara

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

4.1.3 *Job Description*

Dari struktur organisasi tersebut, setiap jabatan memiliki tugas masing-masing, sebagai berikut :

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

   Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ utama Bank BTN yang memegang kekuasaan dan mempunyai wewenang tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.

2. Dewan Komisaris

   Tugas Utama Komisaris adalah bertanggung jawab atas pengawasan, pengelolaan atau pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris juga bertanggung jawab mengawasi kinerja dan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip GCG (Good Corporation Govermance).

3. Direksi

   Direksi bertugas mengelola perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Direksi wajib mewakili perusahaan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi juga memelihara dan mengurus asset atau kekayaan Bank dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai tujuannya dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

   Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinasikan tugas operasional di bidang audit internal. Sedangkan Wakil Direktur Utma bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikandan mengevaluasi tugas operasional di bidang Sekretariat Perusahaan, Penelitian dan perencanaan serta kebijakan dan pengembangan bisnis Bank

4. Dewan Pengawas Syariah

   DewanPengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

5. Komite – Komite

   Adapun tugas masing-masing komite adalah sebagi berikut :

   a. Komite Remunerasi dan Nominasi**,** tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remuniserasi dan nominasi yaitu melakukan

evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi pada Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan atau penggantian Dewan Komisaris atau Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi,

b. Komite Pemantau Risiko**,** tugas komite pemantau risiko antara lain melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya, melakukan evaluasi tentang kesesuaian kebijakan manajemen resiko dan pelaksanaanya, dan mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko bank.

c. Komite Audit, tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, menilai pelaksanaan kegiatan, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, mengevaluasi proses pelaporan laporan keuangan, mengevaluasi ketaatan Bank pada peraturan Internal dan perundang-undangan serta memberikan laporan pada Dewan Komisaris baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Komite Personalia Pusat**, t**ugas komite ini adalah menetapkan dan merumuskan strategi kebijakan dan system pengelolaan sumber daya

manusia, menetapkan dan memutuskan kenaikan dan variabel imbal jasa, intensi dan kemashalatan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program Sumber Daya Manusia serta mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan masukan yang disampaikan komite personalia cabang.

e. Komite Kredit**,** komite kredit bertugas memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan perkreditan.

f. Komite Manajemen Resiko**,** tugas utama fungsi Komite Manajemen Risiko adalah untuk memastikan bahwa Bank pada setiap waktu telah memiliki kerangka manajemen risiko yang lengkap serta efektif dan penuh kehati-hatian untuk melindungi kepentingan baik pemegang saham maupun nasabah.

g. Komite Produk**,** komite ini bertugas memberikan pengarahan dan pertimbangan atas rencana pengembangan produk Bank BTN sehingga produk Bank yang akan dikeluarkan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mempunyai daya saing dan daya tarik terhadap kompetisi di pasar.

h. Komite Teknologi**,** tugas komite ini adalah memberikan pertimbangan sekaligus menentukan kebijakan yang terkait dengan pengembangan

teknologi informasi yang diimplementasikan oleh Bank untuk memberikan dukungan layanan kepada nasabahnya.

i. Komite Kebijakan Perkreditan**,** komite ini berfungsi memberikan pengarahan dan pertimbangan terhadapr kebijakan perkreditan Bank.

j. ALCO, komite Aset dan Liabilitas bertugas mengelolaa aset dan kewajiban Bank BTN. Dalam aspek yang lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas,pengelolaan perbedaan waktu, pengelolaan valuta asing, manajemen suku bunga, manajemen investasi dan pendapatan.

k. Inten Audit**,** Inten audit bertugas untuk membantu tugas DIrektur Utama dan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan system pengendalian intern bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruksi terhadap pengelolaan bank.

l. *Corporate Secretary***,** Sekretaris Perusahaan bertugas melaksanakan sentralisasi pemberian informasi kepada pihak eksternal, meningkatkan komunikasi antara Bank dengan pihak eksternal dan pihak terkait lainnya serta meningkatkan pengelolaan aspek legal perusahaan.

m. *Change Management Office*, bertugas melaksanakan perubahan-perubahan manajemen kantor, merekstrukturi manajamen kantor yang perlu dirubah sesuai kebutuhan perusahaan.

6. Adapun pengelompokan Divisi sesuai tugasnya masing-masing antara lain:

a. *Housing and Commercial Banking*

Divisi yang meliputi pengelolaan di bidang perumahan dan komersial pinjaman, komersial pendanaan dan layanan, dan mengenai kegiatan usaha bank yang berprinsip syariah.

b. Mortgage and Consumer Banking

Divisi yang meliputi pengelolaan di bidang penggadaian, konsumen kredit usaha, media elektronik perbankan beserta kartu elektronik yang digunakan (ATM), kerjasama perbankan, yang menjadi prioritas bank dan layanan asuransi yang akan disediakan oleh pihak bank.

c. Operation

Divisi yang meliputi pengelolaan fasilitas teknologi komunikasi yang ada di bank, logistik maupun jaringan, dan bagian operasional perusahaan maupun bantuan bisnis.

d. Risk Compliance and Human Capital

Divisi ini meliputi pengelolaan manajemen risiko, hukum dan dokumen pinjaman (kredit), dan sumber daya manusia perusahaan.

e. Financial, Strategic and Treasury

Divisi ini meliputi pengelolaan rencana dan pelaksanaan manajemen, keuangan beserta akuntansinya, penagihan dan penyelamatan kredit, dan pembendaharaan lainnya.

4.1.4 Aspek Perusahaan

PT. Bank Tabungan Negara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) terbagi kedalam tiga bidang usaha, antara lain :

1. Produk Dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sebagai berikut :
   a. Tabungan Batara

      Merupakan tabungan multiguna yang aman untuk dana nasabah dengan berbagai kemudahan yang terus meningkat.
   b. Tabungan E-Batara Pos

      Merupakan peremajaan dari produk Tabanas Batara yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui loket kantor Pos yang telah ditentukan.

c. Tabungan Haji Nawaitu

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

d. Tabungan Batara Prima

Merupakan tabungan dengan suku bunga yang tinggi dan fleksibilitas penarikan serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik.

e. Tabungan Batara Junior

Merupakan peremajaan dari tabungan Batara Pelajar dengan peruntukan lebih luas untuk semua kalangan yang sensitive terhadap biaya administrasi bulanan.

f. Giro

Merupakan simpanan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau media lainnya.

g. Deposito Berjangka

Merupakan simpanan berjangka baik dalam mata uang rupiah maupun USD yang menguntungkan.

2. Produk Jasa dan Layanan yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sebagai berikut :

a. Kartu ATM Batara

Kartu ATM BTN merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan Giro (RP-Perorangan) di Bank BTN yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai

macam kebutuhan transaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan, dan sebagainya.

b. Kiriman Uang

Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang ditujukan kepada pihak lainnya di suatu tempat (dalam atau luar negeri).

c. Inkaso

Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain di dalam negeri maupun luar negeri.

d. *Money Changer*

Adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

e. *Safe Deposit Box*

Sarana penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan, dan bencana alam dan sebagainya.

f. Bank Garansi

Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.

g. RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah yang penyelesainnya dilakukan per transaksi secara individual.

h. Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

Memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji berkat system online dan SISKOHAT.

i. SMS Batara

SMS Batara merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan yang dapat diakses dari handpone. Cukup dengan mengetik sms ke nomor 3555, nasabah dapat menikmati kemudahan melakukan transfer uang, pembayaran tagihan rutin, pembelian voucher isi ulang, serta transaksi lainnya.

j. Batara *Payroll*

Merupakan layanan Bank di BTN bagi pengguna jasa (Perusahaan, peropangan, Lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan Bonus serta kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa.

k. *Payment Point*

Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin.

l. *SPP Online*

SPP Oline merupakan layanan Bank BTN bagi Perguruan Tinggi atau sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara otomatis.

3. Produk Kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), sebagai berikut :

a. KPR Bersubsidi

Fasilitas kredit subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat.

b. KPR Griya Utama

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah atau apartemen baru atau lama.

c. KPR Platinum

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian rumah atau apartemen, termasuk take over dengan nilai kredit > 150 juta.

d. Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Fasilitas kredit untuk membeli apartemen jadi (baru/bekas), apartemen indent atau take over dari bank lain.

e. Kredit Kepemilikan Ruko (KP Ruko)

Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank untuk membeli Rumah Toko, Rumah Usaha, Rumah Kantor, dan Kios.

f. Kredit Griya Multi

Fasilitas krediyang diberikan untuk berbagai keperluan seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah atau kebutuhan konsumtif lainnya.

g. Kredit Swa Griya

Fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan membangun rumah diatas lahan milik sendiri.

h. Kredit Swadana

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di BTN.

i. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)

Fasilitas krediyang diberikan kepada perusahaan untuk penyediaan fasilitas perumahan dinas perusahaan ataupun fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama antara Bank BTN dengan perusahaan dalam mendukung program perumahan.

j. Real Cash

Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu-wktu (standby loan)

k. Kredit Ringan Batara (KRB)

Fasilitas kredit ysng diberikan kepada karyawan perusahaan pengguan jasa batara payroll dengan agunan gaji karyawan.

l. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

Kredit untuk meningkatkan akses usaha Mikro dan Kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang relative ringan dan terjangkau.

m. Kredit Yasa Griya

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.

n. Kredit Pendukung Perumahan

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja dan atau investai, khususnya kepada sektor industri yang terkait dengan perumahan, termasuk usaha-usaha penunjangannya.

o. Kredit Modal Kerja Kontraktor

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

p. Kredit Investasi

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan investasi, baik investasi baru, perluasan modernisasi atau rehabilitas.

4.2 Hasil Pembahasan Masalah

Pembahasan mengenai penilaian Kualitas Aktiva Produktif PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yaitu :

4.2.1 Analisis Kualitas Aktiva Produktif

Dalam analisis kualitas aktiva produktif rasio yang digunakan untuk kuantitatif aktiva produktif didasarkan pada dua rasio yaitu :

4.2.1.1 Bad Debt Ratio (BDR)

Rasio ini digunakan untu mengetahui sejauhmana bank memelihara kualita aktivanya seproduktif mungkin untuk meningkatkan rentabilitas.

Tabel 4.1
Aktiva Produktif PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tahun 2002-2009

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
2002	23.822.890	1.255.669	297.404	94.620	506.090	25.976.673
2003	22.920.514	1.700.536	216.971	50.914	493.275	25.382.210
2004	22.873.960	1.836.885	142.596	72.798	188.809	25.115.048
2005	24.045.882	2.317.951	139.063	113.182	355.594	26.971.672
2006	27.097.698	3.149.558	76.080	130.446	469.190	30.923.002
2007	30.295.570	3.164.557	77.414	132.152	656.683	34.326.376
2008	38.592.640	4.086.022	132.373	192.334	827.445	43.830.814
2009	50.728.593	5.129.525	114.410	207.834	1.047.759	57.228.121

Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tabel 4.2
Komposisi Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan
Tahun 2002-2009

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	L (0%)	DPK (25%)	KL (50%)	D (75%)	M (100%)	Jumlah
2002	-	313.912,25	148.702	70.965	506.090	1.039.674,25
2003	-	425.134	108.485,5	38.185,5	493.275	1.065.080
2004	-	459.221,25	71.298	54598,5	188.809	773.926,75
2005	-	579.487,75	69.531,5	84.886,5	355.594	1.089.499,75
2006	-	787.389,5	38.040	97.834,5	469.190	1.392.454
2007	-	791.139,25	38.707	99.114	656.683	1.585.643,25
2008	-	1.021.505,5	66.186,5	144.250,5	827.445	2.059.387,5
2009	-	1.282.381,25	57.205	155.875,5	1.047.759	2.543.220,75

Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Perhitungan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total kualitas aktiva produktif :

$$\textbf{BDR} = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \text{ X } 100\ \%$$

$$\textbf{Rasio (2002)} = \frac{1.039.674,25}{25.976.673} \text{ x } 100\% = 4\%$$

Penurunan = 15,5% - 4% = 11,5%

$$\text{NK} = \frac{11,5\%}{0,15\%} = 76,67$$

Nilai Akhir = 25% x 76.67 = 19,18

Rasio (2003) = $\frac{1.065.080}{25.382.210}$ x 100% = 4,20%

Penurunan = 15,5% - 4,20% = 11,3%

NK = $\frac{11,3\%}{0,15\%}$ = 75,33

Nilai Akhir = 25% x 75,33 = 18,83

Rasio (2004) = $\frac{773.926,75}{25.115.048}$ x 100% = 3,08%

Penurunan = 15,5% - 3,08% = 12,42%

NK = $\frac{12,42\%}{0,15\%}$ = 82,8

Nilai Akhir = 25% x 82,8 = 20,7

Rasio (2005) = $\frac{1.089.499,75}{26.971.672}$ x 100% = 4,04%

Penurunan = 15,5% - 4,04% = 11,46%

NK = $\frac{11,46\%}{0,15\%}$ = 76,4

Nilai Akhir = 25% x 76,4 = 19,1

Rasio (2006) = $\frac{1.392.454}{30.923.002}$ x 100% = 4,50%

Penurunan = 15,5% - 4,50% = 11%

NK = $\frac{11\%}{0,15\%}$ = 73,33

Nilai Akhir = 25% x 73,33 = 18,33

Rasio (2007) = $\frac{1.585.643,25}{34.326.276}$ x 100% = 4,62%

Penurunan = 15,5% - 4,62% = 10,88%

NK = $\frac{10,88\%}{0,15\%}$ = 72,53

Nilai Akhir = 25% x 72,53 = 18,13

Rasio (2008) = $\frac{2.059.387,5}{43.830.814}$ x 100% = 4,70%

Penurunan = 15,5% - 4,70% = 10,8%

NK = $\frac{10,8\%}{0,15\%}$ = 72

Nilai Akhir = 25% x 72 = 18

Rasio (2009) = $\frac{2.543.220,75}{57.228.121}$ x 100% = 4,44%

Penurunan = 15,5% - 4,44% = 11,06%

NK = $\frac{11,06\%}{0,15\%}$ = 73,73

Nilai Akhir = 25% x 73,73 = 18,43

Tabel 4.3
Kriteria penilaian tingkat kesehatan faktor BDR

Kriteria	Hasil Rasio BDR
Sehat	0,00% − ≤ 10,35%
Cukup Sehat	> 10,35% − ≤12,60%
Kurang Sehat	> 12,60% − ≤14,85%
Tidak Sehat	> 14,85%

Sumber: SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR/97

Tabel 4.4
Bad Debt Ratio
Tahun 2002-2009

Tahun	Hasil Rasio BDR	Kriteria
2002	11,5%	Cukup sehat
2003	11,3%	Cukup sehat
2004	12,42%	Cukup sehat
2005	11,46%	Cukup sehat
2006	11%	Cukup sehat
2007	10,88%	Cukup sehat
2008	10,8%	Cukup sehat
2009	11,06%	Cukup sehat

Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Dari hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2002 rasio yang dihasilkan sebesar 11,5%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

2. Tahun 2003 rasio yang dihasilkan sebesar 11,3%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

3. Tahun 2004 rasio yang dihasilkan sebesar 12,42%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukkup sehat.

4. Tahun 2005 rasio yang dihasilkan sebesar 11,46%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

5. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 11,00%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

6. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 10,88%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

7. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 10,8%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

8. Tahun 2009 rasio yang dihasilkan sebesar 11,06%. Berdasarkan kriteria BI, maka kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dinilai cukup sehat.

4.2.1.2 Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (CAD)

Rasio ini mengukur pembentukan PPAP yang dibentuk bank terhadap PPAWD yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan dengan adanya kewajiban bank untuk membentuk PPAP yang cukup untuk menutup risiko kemungkinan yang timbul dari penanaman aktiva produktifnya.

Tabel 4.5
Komposisi Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan terhadap PPAPWD
Tahun 2002-2009

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PPAP yang dibentuk	PPAPWD	CAD	NK (Rasio x 1)	Nilai Akhir
2002	1.146.540	631.198	181,65%	181,65	100
2003	752.567	587.853	128%	128	100
2004	641.398	278.263	230,5%	230,5	100
2005	615.129	380.194	161,79%	161,79	100
2006	566.813	473.367	119,74%	119,74	100
2007	549.608	462.667	118,79%	118,79	100
2008	605.505	511.955	118,27%	118,27	100
2009	750.291	666.116	112,64%	112,64	100

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Per**sero)**

Perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produkti yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk yaitu :

$$\text{CAD} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAPWD}} \text{ X } 100\ \%$$

$$\textbf{Rasio (2002)} = \frac{1.146.540}{631.198} \text{ x } 100\% = 181,65\%$$

$$\textbf{Rasio (2003)} = \frac{752.567}{587.853} \times 100\% = 128\%$$

$$\textbf{Rasio (2004)} = \frac{641.398}{278.263} \times 100\% = 230{,}5\%$$

$$\textbf{Rasio (2005)} = \frac{615.129}{380.194} \times 100\% = 161{,}79\%$$

$$\textbf{Rasio (2006)} = \frac{566.813}{473.367} \times 100\% = 119{,}74\%$$

$$\textbf{Rasio (2007)} = \frac{549.608}{462.667} \times 100\% = 118{,}79\%$$

$$\textbf{Rasio (2008)} = \frac{605.505}{511.955} \times 100\% = 118{,}27\%$$

$$\textbf{Rasio (2009)} = \frac{750.291}{666.116} \times 100\% = 112{,}64\%$$

Tabel 4.6
Kriteria penilaian tingkat kesehatan faktor CAD

Kriteria	Hasil Rasio CAD
Sehat	≥ 81,00%
Cukup Sehat	≥ 66,00% − <81,00%
Kurang Sehat	≥ 51,00% − <66,00%
Tidak Sehat	< 51%

Sumber: SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR/97

Tabel 4.7
Cadangan Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan
Tahun 2002-2009

Tahun	Hasil Rasio CAD	Kriteria
2002	181,65%	Sehat
2003	128%	Sehat
2004	230,5%	Sehat
2005	161,79%	Sehat
2006	119,74%	Sehat
2007	118,79%	Sehat
2008	118,27%	Sehat
2009	112,64%	Sehat

Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Dari perhitungan rasio tersebut dapat dijelaskan sebagai berrikut :

1. Tahun 2002 rasio yang dihasilkan sebesar 181,65%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
2. Tahun 2003 rasio yang dihasilkan sebesar 128%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
3. Tahun 2004 rasio yang dihasilkan sebesar 230,5%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
4. Tahun 2005 rasio yang dihasilkan sebesar 161,79%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.

5. Tahun 2006 rasio yang dihasilkan sebesar 119,74%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
6. Tahun 2007 rasio yang dihasilkan sebesar 118,79%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
7. Tahun 2008 rasio yang dihasilkan sebesar 118,27%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.
8. Tahun 2009 rasio yang dihasilkan sebesar 112,64%. Hal ini berarti kualitas CAD pada PT. Bank Tabungan Negara dinilai sehat karena melebihi standar dari penilaian BI.

4.2.2 Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif

Setelah perhitungan kedua rasio kualitas aktiva produktif pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero), hasil perhitungan kedua rasio tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing rasio sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Adapun penilaian secara keseluruhan kualitas aktiva produktif selama tahun 2002-2009 adalah sebagi berikut :

Tabel 4.8
Kuantitatif Perhitungan Nilai Kredit Akhir
Untuk Kualitas Aktiva Produktif PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tahun 2002-2009

Tahun	Komponen	Rasio	NK	NK Max	Bobot	Nilai Akhir
2002	BDR	11,5%	76,67	100	25%	19,18
	CAD	181,65%	181,65	100	5%	5
	Jumlah					24,18
2003	BDR	11,3%	75,33	100	25%	18,83
	CAD	128%	128	100	5%	5
	Jumlah					23,83
2004	BDR	12,42%	82,8	100	25%	20,7
	CAD	230,5%	230,5	100	5%	5
	Jumlah					25,7
2005	BDR	11,46%	76,4	100	25%	19,1
	CAD	161,79%	161,79	100	5%	5
	Jumlah					24,1
2006	BDR	11%	73,33	100	25%	18,33
	CAD	119,79%	119,79	100	5%	5
	Jumlah					23,33
2007	BDR	10,88%	72,53	100	25%	18,13
	CAD	118,79%	118,79	100	5%	5
	Jumlah					23,13
2008	BDR	10,8%	72	100	25%	18
	CAD	118,27%	118,27	100	5%	5
	Jumlah					23
2009	BDR	11,06%	73,73	100	25%	18,43
	CAD	112,64%	112,64	100	5%	5
	Jumlah					23,43

Sumber : PT.Bank Tabungan Negara (Persero)

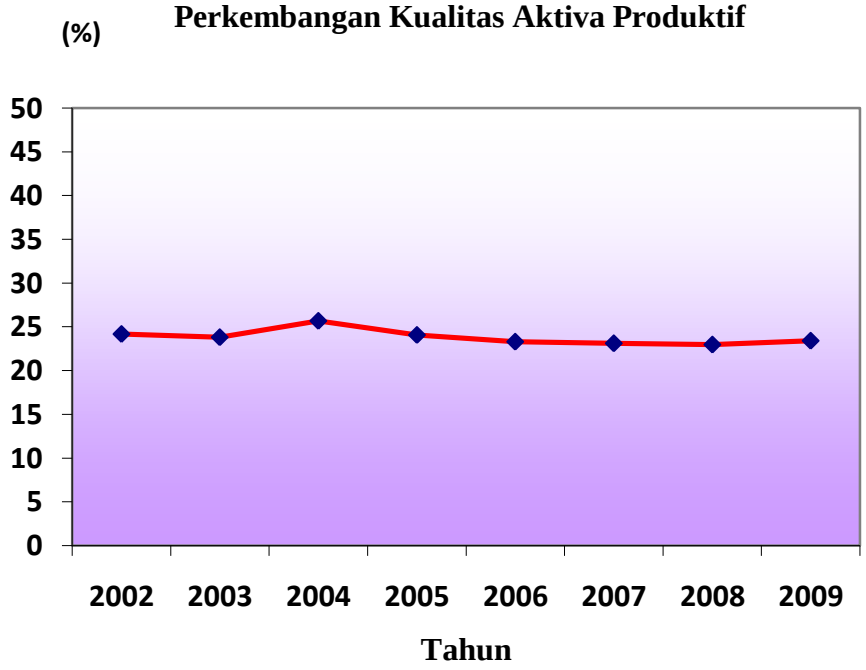
Tabel 4.9
Fluktuasi Kualitas Aktiva Produktif
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tahun 2002-2009

Tahun	Nilai Akhir Aktiva Produktif	Fluktuasi	
		Nilai	%
2002	24,18	-	-
2003	23,83	(0,35)	(1,45)
2004	25,7	1,87	7,85
2005	24,1	(1,6)	(6,23)
2006	23,33	(0,77)	(3,20)
2007	23,13	(0,20)	(0,86)
2008	23	(0,13)	(0,56)
2009	23,43	0,43	1,87

Sumber : PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Berdasarkan hasil penilaian kuantitatif, perkembangan kualitas aktiva produktif berdasarkan kedua rasio yaitu sebagai berikut :

Grafik 4.1
Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif



Pada grafik dapat dilihat bahwa kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) pada tahun 2002 memiliki bobot nilai

sebesar 24,18. Kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2003 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2002 dengan bobot sebesar 23,83. Namun, kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2004 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003 dengan bobot sebesar 25,7. Selanjutnya, kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan dengan bobot masing-masing sebesar 24,1 ; 23,33 ; 23,13 dan 23. Dan akhirnya kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan bobot sebesar 23,34.

4.2.3 Upaya Peningkatan Kualitas Aktiva Produktif

Dalam peningkatan Kualitas Aktiva Produktif diperlukan upaya pihak bank untuk mengatasinya. Dikarenakan Aktiva Produktif yang banyak bermasalah sebagian besar adalah kredit yang diberikat. Maka, upaya pihak bank dalam mengatasi kredit bermasalah untuk meningkatkan kualitas aktiva produktif yaitu sebagai berikut :

1. Surat Peringatan I (SP I)

   Surat peringatan pertama merupakan surat yang diberikan kepada debitur yang telah memasuki tahap perhatian khusus dalam pembayaran kredit. Yang termasuk dalam tahap perhatian khusus yaitu

debitur yang belum membayar angsuran selama 1 s/d 3 bulan pembayaran.

2. Surat Peringatan II (SP II)

   Surat peringatan kedua merupakan surat yang diberikan kepada debitur yang telah memasuki tahap kurang lancar dalam pembayaran kredit. Yang termasuk dalam tahap kurang lancar yaitu debitur yang termasuk dalam pengawasan Bank Indonesia ± 3 bulan..

3. Surat Peringatan III (SP III)

   Surat peringatan yang ketiga merupakan surat yang diberikan kepada debitur yang telah memasuki tahap diragukan dalam pembayaran kredit. Yang termasuk dalam tahap diragukan yaitu debitur yang belum membayar angsuran selama 4 s/d 6 bulan pembayaran.

4. Berita acara kunjungan

   Karena semua surat peringatan tidak dihiraukan dan debitur tersebut telah masuk pada tahap kredit macet, maka petugas dari pihak bank membuat berita acara kunjungan pada debitur. Apabila debitur tetap tidak dapat membayar angsuran pembayaran kredit. Petugas akan memberi stempel pada rumah yang dikreditkan. Stempel tersebut tertera tulisan bahwa rumah ini dalam pengawasan PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Dan rumah tersebut akan dilelang oleh pihak bank.